

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan berjalannya pelaksanaan otonomi daerah, akuntansi sektor publik di Indonesia juga terus berkembang. Sekarang ini, sistem keuangan sudah memasuki babak baru. Reformasi dalam manajemen keuangan Negara Indonesia diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam perkembangannya, akuntansi sektor publik selain untuk suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntansi sektor publik juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban ini, masyarakat semakin memperlihatkan praktik akuntansi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan nasional untuk mewujudkan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan sesuatu tranparansi serta akuntabilitas dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mengingat laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, suatu laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima umum.

Sehingga dalam penyusunannya sangat diperlukan sistem akuntansi yang baik, yang dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan tetap mengutamakan transparan-transparansi dan akuntabilitas.

Dalam setiap kegiatan pemerintahan, baik itu pemerintahan kecil, menengah, maupun pemerintahan besar, perlu sekali adanya suatu sistem yang baik dalam menjalankan setiap kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan akan dapat dilakukan secara lancar dan tersusun rapi apabila dalam pemerintahan tersebut tercipta suatu sistem yang baik, efektif, dan efisien, yang dapat membantu dalam pelaksanaan, pengawasan, ataupun dalam tiap aktivitas pemerintahan tersebut. Pelaksanaan suatu sistem yang baik ini akan mencerminkan kokohnya suatu pemerintahan.

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan suatu usaha kesatuan ekonomis bertujuan untuk menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak lainnya yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Fungsi sistem informasi yaitu mengtransformasi data menjadi informasi yang akan digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh organisasi.

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut diberikan kepada para pembuat

keputusan. Pada saat Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem ini dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.

Suatu daerah dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran dengan cara yang telah ditentukan dalam ukuran moneter (dalam hal ini uang), dan transaksi atau kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asa ekonomi dan tugs pembantuan dnegan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur pencatatan pada akuntasni pemerintahan dikelompokan menjadi enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas.

Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemberintahan. Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Standart Akuntansi Pemerintah nomor 14 tentang akuntansi kas, kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling efektif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas

Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah daerah. Kas ialah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah,

baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya. Sedangkan pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan.

Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang baik merupakan suatu alat untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan prosedur yang baik salah satu cara yang ditempuh adalah penyusunan sistem penerimaan dan pengeluaran berdasarkan mekanisme yang berlaku. Agar pelayanan dan manajemen keuangan daerah semakin baik sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Salah satu instansi tersebut yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertugas untuk mengelola keuangan dan pemeliharaan terhadap aset daerah sehingga anggaran yang dimiliki daerah dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan oleh pemerintahan.

Dengan penjelasan dan memperhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas judul yang berkaitan dengan: “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGLUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sistem informasi akuntansi sangat penting baik dalam perusahaan swasta, dinas, dan organisasi lainnya untuk kesejahteraan karyawan. Maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

2. Bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

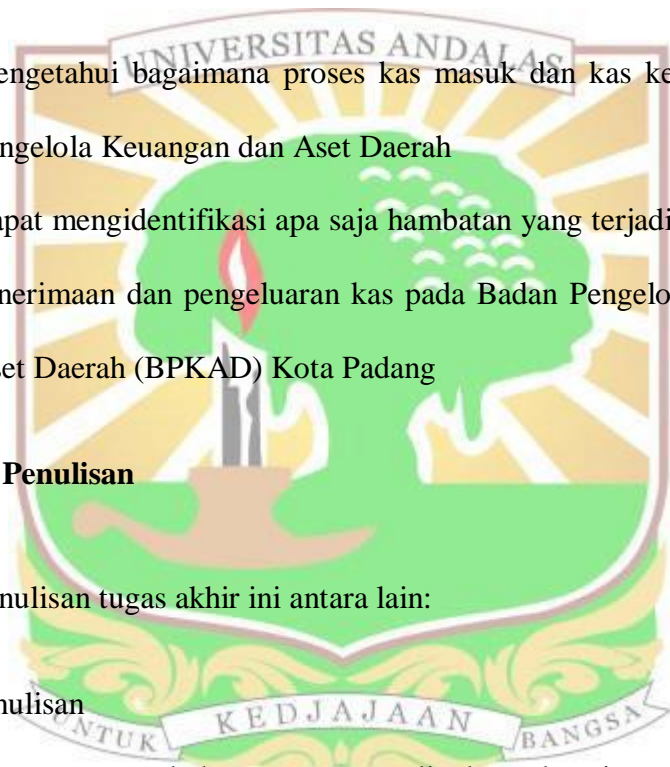
Berikut tujuan dari pelaksanaan penulisan :

1. Mengetahui bagaimana proses kas masuk dan kas keluar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Dapat mengidentifikasi apa saja hambatan yang terjadi pada saat proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Bagi Penulisan
  - a. Dapat menambah wawasan penulis dan sebagai penerapan teori-teori yang telah didapat dari bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya
  - b. Dapat menambah pengetahuan, meningkatkan kreativitas dan mengembangkan keterampilan penulis
  - c. Dapat mengetahui tentang cara-cara, sistem dan teknologi yang digunakan di dalam duni kerja



2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

Dapat digunakan sebagai masukan, dan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

3. Bagi Pembaca

Dapat memberi tambahan pengetahuan, wawasan, informasi dan referensi dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang

#### 1.4 Penyusunan Laporan Magang

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan**

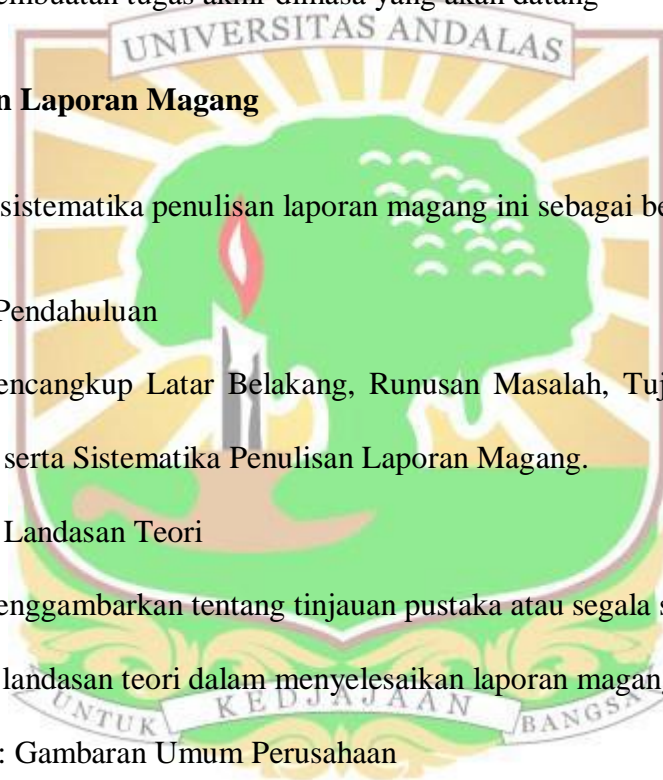
Mencangkup Latar Belakang, Runusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Magang serta Sistematika Penulisan Laporan Magang.

**BAB II: Landasan Teori**

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan laporan magang ini.

**BAB III: Gambaran Umum Perusahaan**

Menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan lembaga yang terdiri dari sejarah, perkembangan badan, visi dan misi, logo, sasaran strategi, dan struktur organisasi.



#### BAB IV: Pembahasan

Berisikan pembahasan tentang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan hasil dari studi lapangan selama di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

#### BAB V: Penutup

Kesimpulan dan saran dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan penulis, yang dapat menjadi masukan bagi pihak instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

